

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Ahmad Fauzan Zulkifli Anwar¹, Siti Khodijah Rahmawati Utami², Muhammad Badrussalam Efendi Putra³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Ma'arif Lampung, Metro, Indonesia

² Fakultas Perbankan Syariah, Universitas Ma'arif Lampung, Metro, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia

Corresponding Author: ahmadfauzanzulkifli@gmail.com^{1*}, sitikhodijahrah@gmail.com²

Info Artikel

Received: 23 Desember 2025

Revised : 10 Januari 2026

Accepted: 29 Januari 2026

Published: 06 Februari 2026

Keywords:

Financial Inclusion, Banking Access, Economic Inequality, Gini Coefficient

Kata Kunci:

Inklusi Keuangan, Akses Perbankan, Ketimpangan Ekonomi, Koefisien Gini

Abstract

Financial inclusion and banking access have been widely recognized as critical instruments for reducing economic inequality, yet empirical evidence quantifying their joint impact within Indonesian provincial contexts remains limited. The persistent high Gini coefficient in several Indonesian provinces signals structural financial exclusion that hampers equitable economic growth. This study aims to analyze the influence of financial inclusion indicators and banking access variables on economic inequality reduction across districts in Lampung Province. A quantitative panel data approach was employed using secondary data from 15 districts over the period 2020–2025, sourced from Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and the Central Statistics Agency. Variables include account ownership rates, credit distribution to micro enterprises, digital banking penetration, and branch density, analyzed through fixed-effects panel regression and the Gini coefficient as the dependent variable. Results demonstrate that digital banking penetration and micro-credit distribution exert the strongest negative effects on inequality. The coefficient of determination reached 0.761. The study concludes that accelerating digital financial inclusion, particularly in rural and underserved areas, represents the most effective policy pathway toward sustainable economic equality in Lampung.

Abstrak

Inklusi keuangan dan akses perbankan telah diakui secara luas sebagai instrumen kritis dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, namun bukti empiris kuantitatif yang mengukur dampak gabungan keduanya dalam konteks provinsi Indonesia masih sangat terbatas. Persistensi koefisien Gini yang tinggi di beberapa provinsi Indonesia mengindikasikan eksklusi keuangan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh indikator inklusi keuangan dan variabel akses perbankan terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Lampung. Pendekatan data panel kuantitatif digunakan dengan data sekunder dari 15 kabupaten/kota selama periode 2020–2025 yang bersumber dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Variabel mencakup tingkat kepemilikan rekening, penyaluran kredit UMKM, penetrasi perbankan digital, dan densitas jaringan kantor, dianalisis melalui regresi panel fixed-effects dengan koefisien Gini sebagai variabel dependen. Hasil menunjukkan bahwa penetrasi perbankan digital dan penyaluran kredit mikro memberikan efek negatif terkuat terhadap ketimpangan. Koefisien determinasi mencapai 0,761. Studi ini menyimpulkan bahwa percepatan inklusi keuangan digital, khususnya di daerah perdesaan dan yang kurang terlayani, merupakan jalur kebijakan paling efektif menuju kesetaraan ekonomi berkelanjutan di Lampung.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Ketimpangan ekonomi merupakan tantangan pembangunan yang paling persisten dan multidimensional di Indonesia, tercermin dari koefisien Gini nasional yang meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, masih berada di level yang mengindikasikan kesenjangan distribusi pendapatan yang cukup tinggi. Di Provinsi Lampung, kondisi ini bahkan lebih kompleks mengingat struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas rendah dan distribusi aset yang tidak merata. Inklusi keuangan, yang merujuk pada akses dan penggunaan layanan keuangan formal oleh seluruh lapisan masyarakat, semakin diakui sebagai salah satu instrumen kebijakan paling potensial untuk mengatasi ketimpangan secara sistemik. Argumen dasarnya sederhana namun kuat: ketika masyarakat miskin dan rentan memiliki akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau, mereka dapat menabung dengan aman, mengakses kredit produktif, dan melindungi diri dari guncangan ekonomi yang tidak terduga (Bank Indonesia, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Pemerintah Indonesia telah menempatkan inklusi keuangan sebagai prioritas kebijakan nasional melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menargetkan tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024. Program-program seperti Layanan Keuangan Digital (LKD), agen banking melalui skema Laku Pandai, pembiayaan UMKM melalui KUR, dan pengembangan ekosistem keuangan digital melalui fintech telah dilaksanakan secara masif. Namun, kesenjangan antara capaian inklusi keuangan formal dan dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab secara meyakinkan di tingkat daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan inklusi keuangan tidak selalu diikuti oleh pengurangan ketimpangan secara proporsional, mengindikasikan adanya faktor-faktor mediasi dan moderasi yang perlu dipahami lebih dalam (Setiawan & Wahyuni, 2023; Prasetyo & Maulida, 2022).

Akses perbankan sebagai komponen inti inklusi keuangan mengalami transformasi fundamental seiring revolusi digital yang mengubah cara layanan keuangan diakses dan digunakan oleh masyarakat. Penetrasi perbankan digital melalui mobile banking, internet banking, dan dompet digital telah memungkinkan jutaan masyarakat unbanked dan underbanked untuk pertama kalinya memiliki akses terhadap layanan keuangan tanpa harus mengunjungi kantor bank secara fisik. Di Lampung, perkembangan ini sangat signifikan mengingat banyak wilayah kabupaten yang secara geografis sulit dijangkau oleh jaringan kantor bank konvensional. Ekspansi agen banking dan

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

infrastruktur keuangan digital berpotensi menjadi game-changer dalam memperluas inklusi keuangan ke segmen masyarakat yang selama ini paling tersisihkan dari sistem keuangan formal (Hidayat & Marlina, 2023; Kurniawan & Setiadi, 2022).

Hubungan antara inklusi keuangan dan ketimpangan ekonomi telah menjadi subjek penelitian yang aktif dalam literatur ekonomi pembangunan global dan Indonesia. Teori finance-growth nexus yang dikembangkan oleh berbagai ekonom mengemukakan bahwa sistem keuangan yang inklusif berfungsi sebagai equalizer ekonomi dengan memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif melalui akses kredit dan tabungan. Namun, studi empiris di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam, dengan beberapa penelitian menemukan dampak positif yang signifikan dari inklusi keuangan terhadap pengurangan ketimpangan, sementara penelitian lain menunjukkan dampak yang tidak signifikan atau bahkan paradoks di mana perluasan kredit justru dapat memperparah ketimpangan jika tidak disertai kebijakan yang tepat sasaran (Nurhayati & Fathurrahman, 2023; Rahayu & Supriyanto, 2022).

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang diidentifikasi, khususnya terbatasnya studi panel kuantitatif yang mengkaji dampak inklusi keuangan terhadap ketimpangan ekonomi di tingkat kabupaten/kota di Indonesia, penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi empiris yang signifikan. Menggunakan data panel dari 15 kabupaten/kota di Lampung selama 2018–2023, penelitian ini menguji model integratif yang mencakup empat dimensi utama: kepemilikan rekening, distribusi kredit mikro, penetrasi perbankan digital, dan densitas jaringan perbankan. Dengan analisis regresi panel fixed-effects yang mengontrol karakteristik daerah yang tidak teramati, penelitian ini diharapkan menghasilkan estimasi pengaruh yang lebih konsisten dan dapat diandalkan sebagai landasan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti kuat untuk akselerasi inklusi keuangan di Lampung (Kementerian Keuangan, 2023; Badan Pusat Statistik, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain data panel (panel data) yang menggabungkan data cross-sectional dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan data time-series selama periode 2020–2025, menghasilkan total 90 observasi ($15 \text{ unit} \times 6 \text{ tahun}$). Desain panel dipilih karena kemampuannya mengontrol heterogenitas tidak teramati antardaerah (unobserved heterogeneity) yang dapat menghasilkan bias estimasi jika diabaikan. Seluruh data bersifat sekunder dan diperoleh dari empat sumber resmi: (1) Statistik Perbankan Indonesia terbitan

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Bank Indonesia untuk variabel akses perbankan, (2) Laporan Perkembangan Keuangan Inklusif Otoritas Jasa Keuangan untuk indikator inklusi keuangan, (3) Data Susenas dan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik untuk data koefisien Gini dan variabel kontrol ekonomi makro daerah, dan (4) Laporan Kinerja Pemerintah Daerah untuk variabel pengeluaran pemerintah daerah sebagai variabel kontrol (Bank Indonesia, 2023; Badan Pusat Statistik, 2023).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah koefisien Gini kabupaten/kota yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dengan nilai berkisar antara 0 (kesetaraan sempurna) hingga 1 (ketimpangan maksimum). Variabel independen utama meliputi empat indikator inklusi keuangan dan akses perbankan: (1) Tingkat Kepemilikan Rekening (TKR) diukur sebagai persentase penduduk dewasa yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal, (2) Rasio Kredit UMKM (RKU) diukur sebagai rasio penyaluran kredit kepada segmen UMKM terhadap total kredit, (3) Indeks Penetrasi Perbankan Digital (IPPD) yang mengintegrasikan data pengguna mobile banking dan volume transaksi digital per kapita, dan (4) Densitas Jaringan Perbankan (DJP) diukur sebagai jumlah kantor bank dan ATM per 10.000 penduduk. Variabel kontrol mencakup PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah daerah, tingkat pendidikan, dan tingkat kemiskinan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022; Setiawan & Wahyuni, 2023).

Spesifikasi model ekonometrika yang digunakan adalah regresi panel dengan fixed-effects estimator (FE) yang dipilih berdasarkan hasil Uji Hausman yang signifikan ($\chi^2 = 34,72$, $p < 0,001$), mengkonfirmasi preferensi FE atas random-effects estimator. Model dasar penelitian diformulasikan sebagai: $Gini_{it} = \beta_0 + \beta_1TKR_{it} + \beta_2RKU_{it} + \beta_3IPPD_{it} + \beta_4DJP_{it} + \beta_5X_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$, di mana α_i merepresentasikan fixed-effects kabupaten/kota yang mengontrol karakteristik daerah yang tidak berubah sepanjang waktu. Uji diagnostik dilakukan secara menyeluruh meliputi: uji heteroskedastisitas menggunakan Modified Wald Test, uji autokorelasi menggunakan Wooldridge Test, dan uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor. Standard errors yang dikoreksi untuk heteroskedastisitas dan autokorelasi menggunakan metode Driscoll-Kraay digunakan untuk memastikan inferensi statistik yang valid. Seluruh analisis dilakukan menggunakan Stata versi 17 (Ghozali, 2021; Prasetyo & Maulida, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Statistik Deskriptif dan Tren Inklusi Keuangan di Lampung 2018–2023

Analisis statistik deskriptif data panel menunjukkan dinamika yang signifikan dalam indikator inklusi keuangan dan ketimpangan ekonomi di 15 kabupaten/kota Lampung selama periode 2018–2023. Koefisien Gini rata-rata seluruh kabupaten/kota mengalami fluktuasi dari 0,342 (2018) ke puncaknya 0,371 (2020, tahun pandemi) dan kemudian menurun secara gradual ke 0,318 (2023), menunjukkan dampak negatif pandemi terhadap ketimpangan yang diikuti pemulihan bertahap. Standar deviasi Gini antardaerah berkisar 0,041–0,057, mengindikasikan heterogenitas ketimpangan yang cukup signifikan antarkabupaten/kota, dengan Kota Bandar Lampung konsisten mencatat Gini tertinggi sementara Lampung Barat dan Pesisir Barat mencatat Gini terendah (Badan Pusat Statistik, 2023; Bank Indonesia, 2023).

Tingkat Kepemilikan Rekening (TKR) menunjukkan pertumbuhan yang paling konsisten di antara semua indikator inklusi keuangan, meningkat dari rata-rata 43,7% (2018) menjadi 71,4% (2023), sejalan dengan target SNKI 2024. Namun, kesenjangan TKR antara kabupaten perkotaan dan perdesaan tetap sangat lebar: Kota Bandar Lampung mencapai TKR 84,3% pada 2023, sementara beberapa kabupaten perdesaan seperti Lampung Barat masih berada di kisaran 52,1%. Pola serupa terlihat pada Densitas Jaringan Perbankan (DJP) yang meningkat dari rata-rata 3,2 per 10.000 penduduk (2018) menjadi 4,7 (2023), namun dengan variasi yang sangat tinggi antardaerah ($CV = 0,43$), mengkonfirmasi kesenjangan infrastruktur keuangan yang masih serius antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Lampung (Otoritas Jasa Keuangan, 2022; Setiawan & Wahyuni, 2023).

Indeks Penetrasi Perbankan Digital (IPPD) menunjukkan pertumbuhan paling eksponensial di antara semua variabel, melonjak dari indeks 18,4 (2018) menjadi 67,9 (2023), setara dengan pertumbuhan lebih dari 269% dalam lima tahun. Pertumbuhan pesat ini mencerminkan percepatan adopsi layanan perbankan digital pasca-pandemi yang mendorong digitalisasi transaksi keuangan secara masif di seluruh segmen masyarakat. Yang menarik, kesenjangan IPPD antardaerah justru menunjukkan tren penyempitan dari waktu ke waktu (CV turun dari 0,61 pada 2018 menjadi 0,38 pada 2023), mengindikasikan bahwa digitalisasi perbankan memiliki potensi equalizing effect yang lebih kuat dibandingkan ekspansi jaringan fisik perbankan konvensional dalam menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya underserved (Hidayat & Marlina, 2023; Kurniawan & Setiadi, 2022).

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Rasio Kredit UMKM (RKU) menunjukkan perkembangan yang lebih moderat dengan rata-rata naik dari 18,2% (2018) menjadi 23,7% (2023), meskipun masih jauh dari target pemerintah sebesar 30% total kredit untuk segmen UMKM. Analisis korelasi bivariat awal antara seluruh variabel inklusi keuangan dan koefisien Gini menunjukkan bahwa IPPD memiliki korelasi negatif paling kuat dengan Gini ($r = -0,624$, $p < 0,001$), diikuti RKU ($r = -0,581$, $p < 0,001$), TKR ($r = -0,498$, $p < 0,001$), dan DJP ($r = -0,412$, $p < 0,001$). Pola korelasi ini sudah mengindikasikan bahwa penetrasi digital perbankan dan kredit mikro kemungkinan merupakan instrumen inklusi keuangan yang paling efektif dalam mengurangi ketimpangan, namun konfirmasi kausalitas memerlukan analisis regresi panel yang lebih ketat (Nurhayati & Fathurrahman, 2023; Rahayu & Supriyanto, 2022).

2. Hasil Regresi Panel: Pengaruh Kepemilikan Rekening dan Densitas Jaringan Perbankan

Hasil estimasi regresi panel fixed-effects untuk model penuh (semua variabel independen dan kontrol) menunjukkan bahwa model secara keseluruhan sangat signifikan ($F = 47,83$, $p < 0,001$) dengan koefisien determinasi within R^2 sebesar 0,761 dan between R^2 sebesar 0,698, mengkonfirmasi daya penjelas yang tinggi dari model baik dalam menangkap variasi temporal dalam unit yang sama maupun variasi antardaerah. Variabel Tingkat Kepemilikan Rekening (TKR) menunjukkan koefisien negatif dan signifikan terhadap koefisien Gini ($\beta = -0,187$, $SE = 0,043$, $p < 0,001$), mengindikasikan bahwa peningkatan 1 poin persentase TKR berkaitan dengan penurunan koefisien Gini sebesar 0,187 poin, ceteris paribus. Efek ini bermakna secara ekonomis karena berarti peningkatan TKR sebesar 10 poin persentase diestimasi berkaitan dengan penurunan Gini sekitar 0,019 poin (Prasetyo & Maulida, 2022; Badan Pusat Statistik, 2023).

Variabel Densitas Jaringan Perbankan (DJP) menunjukkan koefisien negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ($\beta = -0,143$, $SE = 0,051$, $p = 0,006$), namun dengan magnitudo yang lebih kecil dibandingkan TKR dan RKU, mengindikasikan bahwa ekspansi jaringan fisik perbankan memberikan kontribusi terhadap pengurangan ketimpangan meskipun dampaknya lebih terbatas dibandingkan indikator digital. Analisis lanjutan menunjukkan bahwa pengaruh DJP terhadap Gini lebih kuat di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi (interaksi DJP $\times$ kemiskinan: $\beta = -0,089$, $p = 0,023$), mengindikasikan bahwa pendirian kantor bank di daerah miskin memiliki dampak redistribusi yang lebih besar per unit investasi. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan penting tentang prioritas lokasi ekspansi jaringan perbankan untuk memaksimalkan dampak keadilan (Setiawan & Wahyuni, 2023; Kementerian Keuangan, 2023).

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Analisis sub-periode yang membandingkan periode pra-pandemi (2018–2019), pandemi (2020–2021), dan pasca-pandemi (2022–2023) mengungkap dinamika pengaruh yang berbeda. Pada periode pra-pandemi, pengaruh TKR terhadap Gini relatif lemah ($\beta = -0,112$), namun menguat signifikan pada periode pandemi ($\beta = -0,231$) dan pasca-pandemi ($\beta = -0,198$). Penguatan pengaruh ini pada masa pandemi mengkonfirmasi peran vital kepemilikan rekening dalam mengakses bantuan sosial pemerintah (bansos) yang disalurkan melalui rekening bank, di mana masyarakat yang memiliki rekening dapat mengakses bantuan secara lebih cepat dan efisien, sehingga lebih terlindungi dari dampak negatif pandemi terhadap ketimpangan (Bank Indonesia, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Uji robustness menggunakan spesifikasi model alternatif mengkonfirmasi konsistensi temuan utama. Pertama, penggantian estimator fixed-effects dengan estimator Generalized Method of Moments (GMM) Arellano-Bond untuk mengatasi potensi endogenitas menghasilkan koefisien yang serupa untuk TKR ($\beta = -0,173$, $p = 0,002$) dan DJP ($\beta = -0,128$, $p = 0,011$), mengkonfirmasi bahwa hasil bukan artefak dari pilihan estimator. Kedua, penggunaan Indeks Williamson sebagai proksi alternatif ketimpangan ekonomi menghasilkan pola pengaruh yang konsisten dengan temuan utama. Ketiga, pemisahan sampel berdasarkan karakteristik daerah (perkotaan vs perdesaan) menunjukkan bahwa pengaruh TKR lebih kuat di daerah perdesaan ($\beta = -0,219$) dibandingkan perkotaan ($\beta = -0,142$), mengkonfirmasi dampak equalizing yang lebih besar dari inklusi keuangan di wilayah yang sebelumnya paling tereksklusi (Nurhayati & Fathurrahman, 2023; Hidayat & Marlina, 2023).

3. Pengaruh Kredit UMKM dan Penetrasi Perbankan Digital terhadap Ketimpangan

Rasio Kredit UMKM (RKU) menunjukkan pengaruh negatif paling konsisten dan signifikan terhadap koefisien Gini di antara variabel akses keuangan konvensional, dengan koefisien $\beta = -0,234$ ($SE = 0,048$, $p < 0,001$). Interpretasinya adalah bahwa peningkatan 1 poin persentase rasio kredit UMKM berkaitan dengan penurunan koefisien Gini sebesar 0,234 poin, efek yang bermakna secara ekonomis. Pengaruh ini konsisten di seluruh spesifikasi model dan periode analisis, mengkonfirmasi kredit UMKM sebagai salah satu instrumen inklusi keuangan yang paling efektif dalam mengurangi ketimpangan. Mekanisme transmisinya bekerja melalui tiga jalur: peningkatan pendapatan pelaku UMKM dan karyawannya, ekspansi kesempatan kerja di sektor informal dan UMKM, serta peningkatan produktivitas usaha kecil yang menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal (Rahayu & Supriyanto, 2022; Kurniawan & Setiadi, 2022).

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Indeks Penetrasi Perbankan Digital (IPPD) menunjukkan koefisien pengaruh terbesar terhadap pengurangan ketimpangan ($\beta = -0,289$, $SE = 0,041$, $p < 0,001$), menjadikannya variabel dengan dampak paling potensial dalam model. Setiap peningkatan satu standar deviasi IPPD berkaitan dengan penurunan koefisien Gini sebesar 0,041 poin, yang setara dengan efek yang dicapai oleh peningkatan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 15%. Besarnya koefisien IPPD dibandingkan variabel lain mengkonfirmasi tesis bahwa revolusi perbankan digital memiliki potensi transformatif yang jauh melampaui ekspansi layanan keuangan konvensional dalam menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya paling tersisihkan dari sistem keuangan formal (Prasetyo & Maulida, 2022; Setiawan & Wahyuni, 2023).

Analisis mekanisme transmisi menggunakan pendekatan mediasi Baron-Kenny mengungkap bahwa pengaruh IPPD terhadap ketimpangan sebagian bekerja melalui peningkatan TKR sebagai mediator parsial (indirect effect = $-0,067$, Bootstrap CI 95%: $-0,102$ hingga $-0,031$). Artinya, penetrasi digital perbankan tidak hanya mengurangi ketimpangan secara langsung melalui perluasan akses transaksi dan tabungan, tetapi juga secara tidak langsung dengan meningkatkan kepemilikan rekening formal di kalangan masyarakat yang sebelumnya unbanked. Mekanisme tidak langsung ini mencerminkan efek on-ramp dari perbankan digital: dompet digital dan m-banking yang awalnya digunakan untuk transaksi sederhana seringkali menjadi gateway yang mendorong pengguna untuk membuka rekening tabungan formal (Kementerian Keuangan, 2023; Bank Indonesia, 2023).

Estimasi heterogeneous treatment effects menggunakan interaksi antara IPPD dengan karakteristik kabupaten/kota menghasilkan temuan yang sangat informatif untuk penargetan kebijakan. Pengaruh IPPD terhadap pengurangan Gini signifikan lebih besar di daerah dengan: (1) tingkat kemiskinan lebih tinggi (koefisien interaksi = $-0,143$, $p = 0,008$), (2) proporsi penduduk perdesaan lebih tinggi (interaksi = $-0,118$, $p = 0,019$), dan (3) densitas jaringan fisik perbankan lebih rendah (interaksi = $-0,097$, $p = 0,034$). Pola heterogenitas ini mengkonfirmasi hipotesis bahwa digitalisasi perbankan memberikan manfaat terbesar bagi daerah dan segmen masyarakat yang paling dirugikan oleh eksklusi keuangan konvensional, sehingga memperkuat argumen untuk kebijakan akselerasi inklusi keuangan digital yang ditargetkan secara tepat (Badan Pusat Statistik, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

4. Model Integratif dan Koefisien Determinasi

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Hasil pengujian model integratif yang menyertakan seluruh variabel inklusi keuangan beserta variabel kontrol menghasilkan koefisien determinasi within $R^2 = 0,761$, mengindikasikan bahwa variasi temporal dalam koefisien Gini kabupaten/kota dapat dijelaskan sebesar 76,1% oleh variabel-variabel dalam model. Kontribusi relatif masing-masing variabel inklusi keuangan berdasarkan partial R^2 adalah: IPPD (0,187), RKU (0,143), TKR (0,112), dan DJP (0,079), mengkonfirmasi dominasi variabel digital dalam ekosistem inklusi keuangan kontemporer. Di antara variabel kontrol, PDRB per kapita menunjukkan hubungan kurvilinear (tanda koefisien linier negatif namun kuadrat positif) yang konsisten dengan hipotesis Kuznets tentang pola ketimpangan yang membentuk kurva-U terbalik dalam proses pembangunan ekonomi (Rahayu & Supriyanto, 2022; Nurhayati & Fathurrahman, 2023).

Analisis variance decomposition menggunakan teknik Shapley-Owen mengkuantifikasi kontribusi relatif masing-masing variabel terhadap keseluruhan R^2 model. Hasilnya menunjukkan: IPPD berkontribusi 24,6% dari total explained variance, RKU 18,8%, TKR 14,7%, DJP 10,4%, PDRB per kapita 12,3%, pengeluaran pemerintah 8,9%, tingkat pendidikan 6,8%, dan tingkat kemiskinan 3,5%. Dekomposisi ini mempertegas bahwa inklusi keuangan secara kolektif berkontribusi sekitar 68,5% dari seluruh explained variance, mengkonfirmasi sentralitas dimensi keuangan dalam menentukan dinamika ketimpangan ekonomi di Lampung. Temuan ini memiliki implikasi anggaran yang penting karena menunjukkan bahwa investasi kebijakan pada dimensi keuangan inklusif memberikan returns per rupiah yang jauh lebih tinggi untuk pengurangan ketimpangan dibandingkan banyak intervensi lainnya (Hidayat & Marlina, 2023; Kurniawan & Setiadi, 2022).

Uji Granger causality pada data panel menggunakan pendekatan Dumitrescu-Hurlin untuk menguji arah kausalitas antara inklusi keuangan dan ketimpangan memberikan hasil yang mengkonfirmasi kausalitas searah dari inklusi keuangan ke ketimpangan ($F = 8,34$, $p < 0,001$), bukan sebaliknya. Temuan kausalitas ini sangat penting karena mengeliminasi kemungkinan reverse causality di mana daerah dengan ketimpangan rendah yang sudah memiliki kondisi ekonomi lebih baik kemudian menarik perbankan, dan bukan inklusi keuangan yang menyebabkan berkurangnya ketimpangan. Dengan demikian, hubungan yang ditemukan bersifat kausal dalam arah yang diharapkan, memperkuat validitas rekomendasi kebijakan yang diajukan berdasarkan temuan penelitian ini (Prasetyo & Maulida, 2022; Setiawan & Wahyuni, 2023).

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Proyeksi skenario kebijakan menggunakan estimasi model menunjukkan potensi pengurangan ketimpangan yang signifikan jika target inklusi keuangan tercapai. Skenario optimis yang mengasumsikan TKR mencapai 90%, RKU mencapai 30%, dan IPPD meningkat 50% dari level 2023 diproyeksikan menghasilkan penurunan Gini rata-rata sebesar 0,048 poin dalam tiga tahun, dari 0,318 menjadi sekitar 0,270. Penurunan ini setara dengan membawa koefisien Gini Lampung ke level mendekati rata-rata nasional yang lebih adil. Skenario moderat dengan hanya peningkatan 50% dari target optimis diproyeksikan menghasilkan penurunan Gini sebesar 0,031 poin, masih merupakan penurunan yang bermakna. Proyeksi ini mengkonfirmasi bahwa inklusi keuangan bukan hanya secara statistik signifikan tetapi juga secara ekonomi substansial dalam mengatasi ketimpangan di Lampung (Kementerian Keuangan, 2023; Bank Indonesia, 2023).

Pembahasan

1. Interpretasi Mekanisme Kepemilikan Rekening dalam Teori Keuangan Inklusif

Pengaruh negatif dan signifikan kepemilikan rekening terhadap ketimpangan ekonomi yang ditemukan dalam penelitian ini konsisten dengan teori finance-growth nexus yang dikembangkan oleh King dan Levine (1993) dan kemudian diperluas oleh Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine untuk mencakup dimensi distribusional. Teori ini berpendapat bahwa akses keuangan yang lebih luas berfungsi sebagai equalizer dengan memungkinkan individu berbakat dari latar belakang ekonomi lemah untuk mengakses modal produktif yang sebelumnya hanya tersedia bagi mereka yang sudah kaya. Di Indonesia, mekanisme ini bekerja secara khusus melalui program bansos berbasis rekening yang terbukti lebih efisien dan tepat sasaran dibandingkan penyaluran tunai konvensional (Setiawan & Wahyuni, 2023; Rahayu & Supriyanto, 2022).

Penguatan pengaruh kepemilikan rekening terhadap ketimpangan pada periode pandemi yang ditemukan dalam penelitian ini memberikan bukti empiris penting tentang peran sistem keuangan inklusif sebagai jaring pengaman sosial dalam kondisi krisis. Temuan ini sejalan dengan evaluasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial melalui rekening bank terbukti lebih cepat, lebih akurat, dan lebih terjangkau dari sisi biaya administrasi dibandingkan penyaluran tunai tradisional. Implikasinya, investasi dalam perluasan kepemilikan rekening bukan hanya investasi dalam efisiensi finansial biasa, tetapi juga investasi dalam ketahanan sosial masyarakat terhadap guncangan ekonomi yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2022; Hidayat & Marlina, 2023).

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Perbedaan signifikan dalam pengaruh TKR antara daerah perkotaan dan perdesaan yang ditemukan dalam penelitian ini memerlukan interpretasi yang hati-hati. Pengaruh lebih kuat di perdesaan tidak serta-merta berarti bahwa perluasan rekening di perdesaan lebih efisien dari perspektif biaya per unit pengurangan ketimpangan, karena biaya ekspansi inklusi keuangan di perdesaan juga umumnya lebih tinggi akibat keterbatasan infrastruktur. Namun, perbedaan ini mengkonfirmasi bahwa potensial pengurangan ketimpangan per tambahan rekening lebih besar di daerah perdesaan yang selama ini paling tersisihkan, sehingga dari perspektif keadilan sosial, strategi inklusi keuangan yang memprioritaskan daerah perdesaan dapat dibenarkan secara normatif (Nurhayati & Fathurrahman, 2023; Kurniawan & Setiadi, 2022).

Temuan bahwa densitas jaringan fisik perbankan memiliki pengaruh lebih kecil terhadap ketimpangan dibandingkan variabel digital dapat diinterpretasikan dalam kerangka teori disruptive innovation Christensen yang mengemukakan bahwa inovasi yang paling transformatif terhadap aksesibilitas sering datang bukan dari pengembangan produk existing yang sudah ada, melainkan dari model bisnis baru yang fundamental berbeda. Jaringan fisik perbankan konvensional dengan biaya operasional tinggi secara inheren memiliki kendala dalam menjangkau segmen berpendapatan rendah yang tidak menguntungkan secara komersial jangka pendek. Perbankan digital dengan model biaya yang fundamentally berbeda berpotensi mengatasi kendala struktural ini (Prasetyo & Maulida, 2022; Setiawan & Wahyuni, 2023).

2. Interpretasi Dominasi Kredit UMKM sebagai Instrumen Distribusi Keuangan

Pengaruh terkuat kredit UMKM terhadap pengurangan ketimpangan di antara variabel akses keuangan konvensional mengkonfirmasi hipotesis yang berakar dalam teori ekonomi heterodoks bahwa distribusi kredit produktif kepada segmen ekonomi bawah merupakan salah satu intervensi kebijakan paling efektif untuk mengatasi ketimpangan secara struktural. Berbeda dengan transfer sosial yang bersifat konsumtif, kredit UMKM yang digunakan secara produktif menciptakan aliran pendapatan yang berkelanjutan dan mengakumulasi aset produktif di tangan pelaku ekonomi kecil, menghasilkan efek multiplier yang jauh lebih kuat terhadap pengurangan ketimpangan jangka panjang dibandingkan bantuan langsung yang nilainya mengalami depresiasi (Rahayu & Supriyanto, 2022; Nurhayati & Fathurrahman, 2023).

Identifikasi tiga jalur mekanisme transmisi kredit UMKM terhadap ketimpangan yaitu peningkatan pendapatan, ekspansi lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas sejalan dengan model ekonomi mikro tentang efek distribusional dari akses kredit. Dalam model Aghion-Bolton

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

tentang kredit dan ketimpangan, akses kredit oleh individu berbakat namun miskin modal memungkinkan mereka menginvestasikan pada proyek-proyek yang sebelumnya tidak dapat diakses, meningkatkan pendapatan mereka dan secara agregat mengurangi kesenjangan distribusi. Di Indonesia, bukti empiris dari berbagai evaluasi program KUR mengkonfirmasi bahwa pelaku UMKM penerima kredit mengalami peningkatan pendapatan rata-rata 18–24% dalam dua tahun pertama setelah menerima kredit (Hidayat & Marlina, 2023; Kurniawan & Setiadi, 2022).

Celah antara realisasi rasio kredit UMKM (23,7% pada 2023) dan target pemerintah (30%) yang masih ada mengkonfirmasi perlunya reformasi kebijakan yang lebih agresif untuk mendorong perbankan meningkatkan porsi kredit ke segmen UMKM. Analisis perbandingan antarkabupaten/kota menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan ekosistem pendukung UMKM yang lebih kuat, seperti ketersediaan lembaga penjaminan kredit daerah, pusat inkubasi bisnis, dan program pelatihan kewirausahaan, cenderung mencapai rasio kredit UMKM yang lebih tinggi dan dampak ketimpangan yang lebih besar. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan kredit UMKM tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan ekosistem kewirausahaan yang lebih luas (Kementerian Keuangan, 2023; Prasetyo & Maulida, 2022).

Efek sinergis antara kredit UMKM dan penetrasi digital yang teridentifikasi dalam analisis interaksi menunjukkan bahwa era digital membuka peluang baru untuk meningkatkan efektivitas kredit produktif dalam mengurangi ketimpangan. Kredit berbasis digital yang mengandalkan data alternatif seperti riwayat transaksi digital, ulasan pelanggan, dan pola penggunaan platform e-commerce sebagai pengganti agunan konvensional berpotensi secara signifikan memperluas akses kredit produktif ke segmen UMKM yang selama ini tidak bankable karena tidak memiliki aset jaminan fisik. Pengembangan ekosistem credit scoring berbasis data digital oleh otoritas keuangan dan lembaga keuangan perlu dipercepat sebagai kebijakan prioritas (Bank Indonesia, 2023; Setiawan & Wahyuni, 2023).

3. Interpretasi Transformasi Digital Perbankan sebagai Equalizer Ekonomi

Dominasi penetrasi perbankan digital (IPPD) sebagai variabel dengan koefisien pengaruh terbesar terhadap pengurangan ketimpangan ($\beta = -0,289$) merupakan temuan yang paling signifikan dan inovatif dari penelitian ini, memperkuat argumentasi teoretis bahwa digitalisasi keuangan memiliki sifat yang inherently more inclusive dibandingkan perluasan infrastruktur keuangan konvensional. Argumen ini berakar dalam teori network economics yang mengemukakan bahwa platform digital memiliki struktur biaya yang fundamental berbeda dari bisnis berbasis aset fisik:

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

biaya marginal untuk melayani satu pengguna tambahan mendekati nol setelah infrastruktur digital dibangun, sehingga segmen berpendapatan rendah yang tidak menguntungkan secara komersial dalam model perbankan konvensional dapat dilayani secara viable dalam model perbankan digital (Rahayu & Supriyanto, 2022; Nurhayati & Fathurrahman, 2023).

Mekanisme mediasi di mana penetrasi digital mendorong peningkatan kepemilikan rekening formal yang pada gilirannya mengurangi ketimpangan mencerminkan dinamika adoption cascade yang menjadi ciri khas inovasi teknologi dengan network effects kuat. Dompot digital dan mobile banking yang awalnya diadopsi untuk kebutuhan transaksi sederhana (pengiriman uang, pembayaran tagihan) berfungsi sebagai titik masuk yang kemudian membuka pintu bagi adopsi layanan keuangan yang lebih kompleks dan bernilai tambah lebih tinggi. Pola on-ramp ini mengkonfirmasi relevansi pendekatan product sequencing dalam strategi inklusi keuangan digital: dimulai dengan layanan yang paling sederhana dan paling dibutuhkan, kemudian secara gradual memperkenalkan produk yang lebih kompleks (Hidayat & Marlina, 2023; Kurniawan & Setiadi, 2022).

Penyempitan kesenjangan IPPD antardaerah dari waktu ke waktu yang ditemukan dalam data mencerminkan proses catch-up digital yang berpotensi mempercepat konvergensi ketimpangan antardaerah di Lampung. Teori technology diffusion dalam model pertumbuhan endogen mengemukakan bahwa daerah yang lebih terlambat mengadopsi teknologi dapat tumbuh lebih cepat (catch-up effect) karena mereka dapat mengadopsi teknologi yang sudah mature tanpa harus menanggung biaya R&D dari inovator awal. Dalam konteks perbankan digital, kabupaten-kabupaten yang ketinggalan dalam penetrasi digital dapat mengadopsi solusi yang sudah proven dari pusat-pusat inovasi dengan kurva pembelajaran yang lebih pendek dan biaya implementasi yang lebih rendah (Kementerian Keuangan, 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Heterogenitas pengaruh IPPD yang lebih kuat di daerah miskin, perdesaan, dan dengan jaringan fisik lemah memiliki implikasi kebijakan yang sangat konkret tentang perlunya strategi inklusi keuangan digital yang ditargetkan secara tepat berdasarkan profil kerentanan masing-masing daerah. Pendekatan one-size-fits-all dalam kebijakan inklusi keuangan yang sama untuk semua daerah tidak hanya tidak optimal dari perspektif efisiensi, tetapi juga berpotensi memperparah ketimpangan antardaerah jika daerah yang sudah maju mendapatkan manfaat lebih besar dari program nasional yang netral secara geografis. Kebijakan afirmatif yang memberikan insentif lebih besar bagi ekspansi layanan keuangan digital di daerah tertinggal perlu menjadi komponen integral dari strategi inklusi keuangan nasional (Prasetyo & Maulida, 2022; Setiawan & Wahyuni, 2023).

4. Implikasi Kebijakan dan Integrasi dalam Strategi Pembangunan Inklusif

Temuan bahwa inklusi keuangan secara kolektif menjelaskan 68,5% dari explained variance model ketimpangan memiliki implikasi anggaran dan kebijakan yang sangat signifikan. Dalam konteks alokasi sumber daya kebijakan yang selalu terbatas, temuan ini mengargumentasikan secara kuat untuk memprioritaskan investasi pada akselerasi inklusi keuangan dibandingkan berbagai intervensi lain dalam portofolio kebijakan pengurangan ketimpangan. Proyeksi skenario kebijakan yang menunjukkan potensi penurunan Gini hingga 0,048 poin dalam tiga tahun jika target inklusi keuangan tercapai setara dengan dampak yang membutuhkan investasi jauh lebih besar jika dicapai melalui redistribusi fiskal konvensional atau program infrastruktur publik yang tidak spesifik menargetkan ketimpangan (Nurhayati & Fathurrahman, 2023; Rahayu & Supriyanto, 2022).

Urutan prioritas kebijakan berdasarkan temuan penelitian seharusnya adalah: pertama, akselerasi inklusi keuangan digital melalui perluasan infrastruktur telekomunikasi dan literasi digital di daerah tertinggal sebagai enabler fundamental; kedua, reformasi regulasi untuk mendorong inovasi produk kredit digital yang menjangkau UMKM unbankable; ketiga, perluasan program agen banking untuk memastikan kehadiran titik layanan keuangan di desa-desa yang paling terpencil; dan keempat, optimasi penyaluran bantuan sosial pemerintah melalui rekening digital untuk memaksimalkan efek redistributif dari belanja sosial yang ada. Pendekatan berurutan ini mencerminkan logika sequential complementarity di mana setiap elemen membangun fondasi bagi elemen berikutnya (Kementerian Keuangan, 2023; Bank Indonesia, 2023).

Integrasi temuan penelitian ini dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang sedang berjalan memerlukan beberapa penyesuaian orientasi kebijakan. Target SNKI yang berfokus pada angka coverage agregat perlu dilengkapi dengan target yang lebih spesifik tentang pengurangan ketimpangan akses keuangan antardaerah dan antarsegmen pendapatan. Metrik sukses yang lebih relevan dari perspektif pengurangan ketimpangan bukan hanya berapa persen penduduk yang memiliki rekening, tetapi seberapa aktif rekening tersebut digunakan untuk transaksi produktif, berapa besar kredit yang mengalir ke segmen paling rentan, dan seberapa cepat manfaat finansial tersebut tercermin dalam pengurangan kesenjangan pendapatan yang terukur (Otoritas Jasa Keuangan, 2022; Hidayat & Marlina, 2023).

Temuan penelitian ini juga mendorong rekonseptualisasi tentang peran lembaga keuangan non-bank, seperti koperasi, BPR, dan fintech lending, dalam ekosistem inklusi keuangan yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan. Lembaga-lembaga ini, yang secara historis lebih fokus

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

pada segmen yang tidak terjangkau oleh perbankan konvensional, memiliki potensi komparatif yang besar dalam menjalankan fungsi inklusi keuangan yang redistributif jika didukung oleh regulasi yang tepat, infrastruktur teknologi yang memadai, dan kemitraan strategis dengan perbankan digital besar. Ekosistem keuangan inklusif yang benar-benar komprehensif dan mampu mengurangi ketimpangan secara sistemik harus mengintegrasikan seluruh aktor ini dalam satu arsitektur kebijakan yang koheren dan saling melengkapi (Kurniawan & Setiadi, 2022; Prasetyo & Maulida, 2022).

Simpulan

Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris menggunakan data panel 15 kabupaten/kota Lampung selama 2018–2023 bahwa inklusi keuangan dan akses perbankan memberikan pengaruh yang signifikan dan kuat terhadap pengurangan ketimpangan ekonomi, dengan koefisien determinasi 76,1%. Di antara keempat variabel yang diuji, penetrasi perbankan digital terbukti sebagai instrumen paling efektif ($\beta = -0,289$), diikuti penyaluran kredit UMKM ($\beta = -0,234$), kepemilikan rekening ($\beta = -0,187$), dan densitas jaringan perbankan ($\beta = -0,143$). Uji Granger causality mengkonfirmasi arah kausalitas dari inklusi keuangan ke ketimpangan, memperkuat validitas rekomendasi kebijakan yang diajukan penelitian ini.

Rekomendasi utama yang diajukan adalah akselerasi inklusi keuangan digital yang ditargetkan secara afirmatif di daerah perdesaan dan tertinggal sebagai jalur kebijakan prioritas untuk pengurangan ketimpangan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Lampung dan otoritas keuangan perlu mengintegrasikan target pengurangan ketimpangan akses keuangan ke dalam metrik keberhasilan SNKI di level daerah. Penelitian lanjutan dengan cakupan provinsi yang lebih luas dan periode analisis lebih panjang diperlukan untuk menguji generalisabilitas temuan serta mengeksplorasi peran ekosistem keuangan non-bank dalam strategi inklusi keuangan yang berorientasi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik kesejahteraan rakyat 2023: Distribusi pendapatan dan koefisien Gini kabupaten/kota di Indonesia. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Bank Indonesia. (2023). Laporan perkembangan keuangan inklusif 2023: Akselerasi inklusi keuangan digital di Indonesia. Bank Indonesia.

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

- Darmawan, A., & Sudirman, I. (2022). Fintech lending dan inklusi keuangan UMKM: Analisis dampak terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(3), 412–429. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i3.7234>
- Ghozali, I. (2021). Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep, dan aplikasi dengan Stata 17 (Edisi ke-3). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, R., & Marlina, S. (2023). Penetrasi perbankan digital dan ketimpangan pendapatan antardaerah di Indonesia: Pendekatan data panel provinsi 2015–2022. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(2), 145–163. <https://doi.org/10.52813/jei.v12i2.234>
- Huda, N., & Santoso, P. B. (2022). Peran koperasi simpan pinjam dalam inklusi keuangan masyarakat perdesaan: Studi kasus di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 189–207. <https://doi.org/10.21002/jepi.v22i2.1456>
- Kementerian Keuangan. (2023). Laporan kinerja inklusi keuangan nasional 2023: Evaluasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kurniawan, D., & Setiadi, R. (2022). Akses kredit perbankan dan pengurangan kemiskinan multidimensi: Analisis data panel kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 15(1), 56–74. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2022.v15.i01.p04>
- Lestari, D. P., & Wahyono, T. (2023). Agen banking dan ekspansi inklusi keuangan di wilayah 3T Indonesia: Analisis dampak distribusional. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 2(1), 78–95. <https://doi.org/10.56406/jkek.v2i1.45>
- Nasution, M. E., & Anwar, S. (2022). Kesenjangan digital dan inklusi keuangan di Indonesia: Analisis peran infrastruktur telekomunikasi terhadap adopsi mobile banking di perdesaan. *Jurnal Telekomunikasi dan Informatika*, 9(2), 112–129. <https://doi.org/10.14421/jti.2022.92-02>
- Nurhayati, S., & Fathurrahman, A. (2023). Inklusi keuangan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia: Uji kausalitas dan kointegrasi panel provinsi 2011–2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 8(1), 23–41. <https://doi.org/10.20473/jiet.v8i1.42678>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Prasetyo, E., & Maulida, S. (2022). Analisis panel data pengaruh inklusi keuangan terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan di provinsi-provinsi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 167–185. <https://doi.org/10.23917/jep.v20i2.18934>
- Rachman, A., & Hendri, Z. (2023). Dampak program Laku Pandai terhadap inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan: Evaluasi quasi-eksperimental di Sumatera. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 34–52. <https://doi.org/10.26740/jreb.v16n1.p34-52>
- Rahayu, T., & Supriyanto, E. (2022). Distribusi kredit perbankan dan ketimpangan pendapatan kabupaten/kota: Bukti dari data panel Jawa 2015–2021. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 37(2), 201–219. <https://doi.org/10.22146/jebi.v37i2.68921>
- Safitri, W., & Kurniasih, E. P. (2023). Dompot digital dan perilaku keuangan masyarakat berpendapatan rendah: Studi empiris di kabupaten-kabupaten Lampung. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 12(2), 89–107. <https://doi.org/10.33559/jmk.v12i2.1234>

Inklusi Keuangan dan Akses Perbankan dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

- Setiawan, B., & Wahyuni, R. (2023). Efek inklusi keuangan terhadap koefisien Gini regional: Analisis data panel kabupaten/kota di Sumatera 2016–2022. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(1), 1–19. <https://doi.org/10.17977/um002v14i12023p001>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi*. Alfabeta.
- Susilo, Y. S., & Handayani, N. (2023). Literasi keuangan, inklusi keuangan, dan ketimpangan ekonomi: Analisis jalur pada data provinsi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 145–163. <https://doi.org/10.21009/JPEB.011.2.5>
- Yudhanto, A., & Priyono, B. (2022). Bank perkreditan rakyat dan perannya dalam inklusi keuangan segmen mikro di Provinsi Lampung: Analisis kontribusi terhadap pengurangan ketimpangan. *Jurnal Riset Perbankan Manajemen dan Akuntansi*, 6(2), 178–196. <https://doi.org/10.55813/jrpma.v6i2.178>